



# Lecture #1: Public Sector Accountability

## What is Accountability? Why is it imperative?



Wahyudi Kumorotomo, PhD

[www.kumoro.staff.ugm.ac.id](http://www.kumoro.staff.ugm.ac.id)



**Accountability:** the degree by which activities of public institutions and/or public services delivered by the government are in line with the norms and values being held by the citizens, whether such services accommodate the actual needs of the society.

*A good synonym for the term accountability is answerability. An organisation must be answerable to someone or something outside itself. When things go wrong, someone must be held responsible. (Starling, 1998:164)*

# TYPES OF ACCOUNTABILITY

(Stewart, 1989)



1. **Policy Accountability**, on policy alternatives that are chosen.
2. **Program Accountability**, on the achievement of objectives / results and its effectiveness.
3. **Performance Accountability**, on the performance or the implementation of tasks in public services.
4. **Process Accountability**, on processes, procedures and accepted instruments in taking actions.
5. **Probity and Legal Accountability**, on the use of public funds, budget compliance, and legal compliance.

# Sistem Pertanggungjawaban (Romzek & Dubnick, 1992)



<b>Type</b>	<b>Analogi Kaitan</b>	<b>Basis Pertalian</b>
Birokratis	Atasan / Bawahan	Supervisi
Legal	Pengatur / Pelaksana Pemimpin / Agen	Perwalian ( <i>Fiduciary</i> )
Profesional	Awam / Pakar	Pengakuan atas keahlian / kepiawaian
Politis	Pemilih / Wakil	Daya tanggap terhadap konstituen

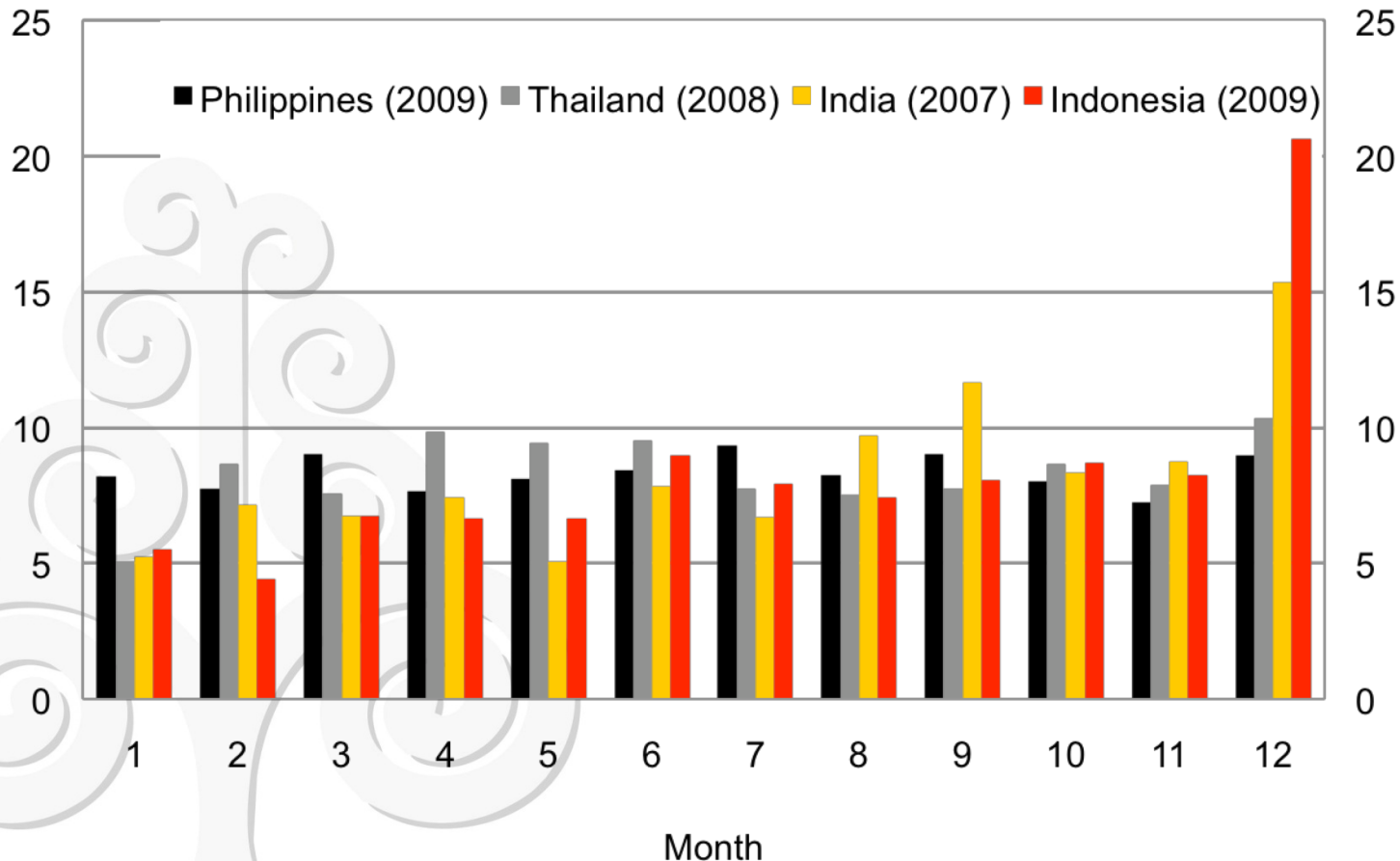


# “TRIPLE ACCOUNTABILITY” UNTUK KEPALA DAERAH (PP No. 3 tahun 2007)

1. Bupati wajib menyusun LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), ditujukan kpd Mendagri melalui Gub (**akuntabilitas ke atas**):
  1. 26 urusan wajib
  2. 8 urusan pilihan
  3. Urusan desentralisasi
2. Bupati wajib menyusun LKPJ (Lap Keterangan Pertanggungjawaban) untuk DPRD (**akuntabilitas ke samping**):
  1. LKPJ akhir tahun anggaran
  2. LKPJ akhir masa jabatan
  3. Tidak ada ket diterima/ditolak (?)
3. Bupati wajib memberi Informasi LPPD kepada masy melalui media cetak/elektronik (**akuntabilitas ke luar**):
  1. Mengapa materinya sama dg LPPD (pasal 27)?
  2. Informasi kepada publik seharusnya selengkap mungkin (berbagai media), tanggapan masy dibuka seluas mungkin.



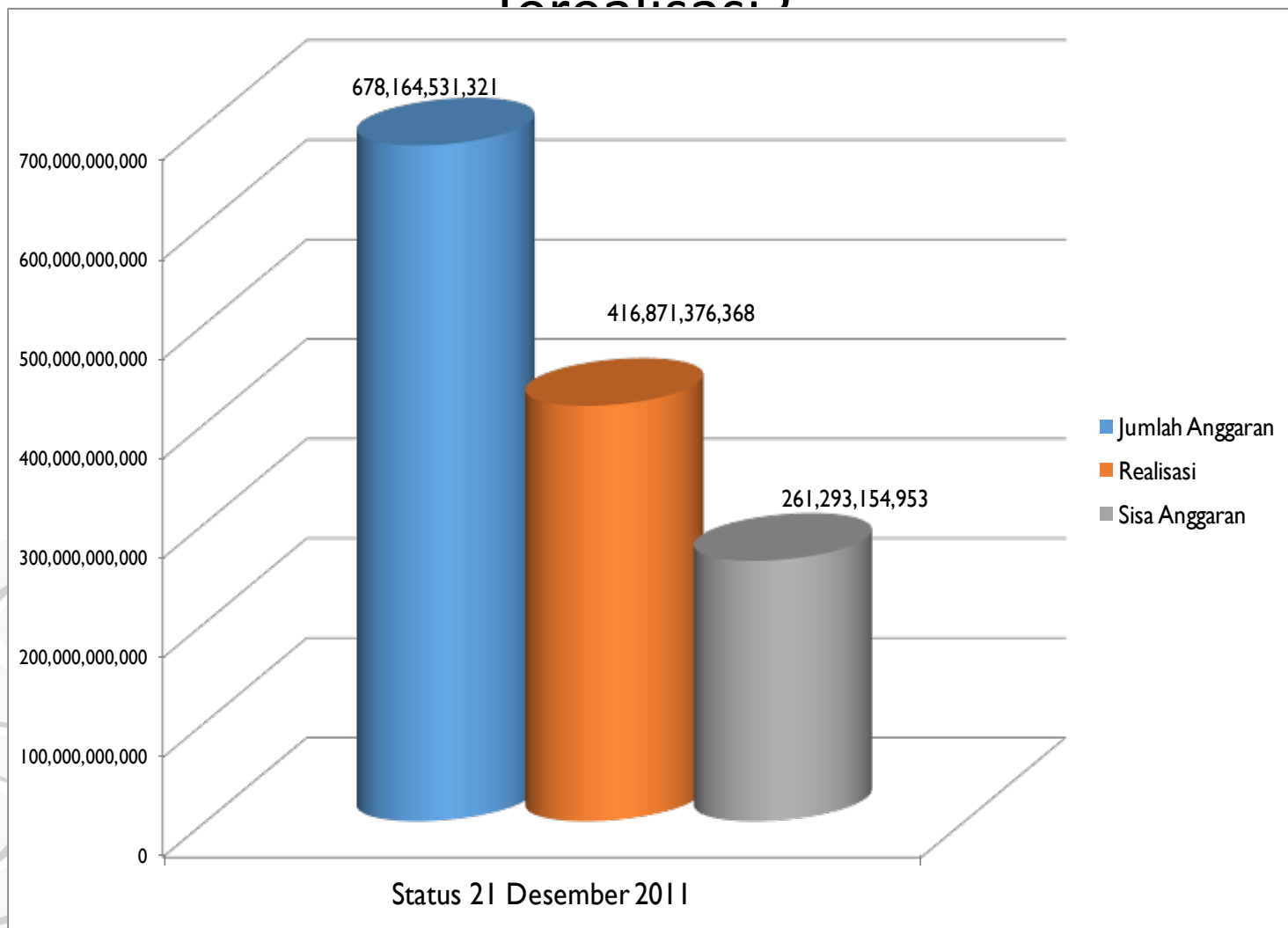
# Penyerapan DIPA lebih Lambat dari Negara Lain



Source: CEIC, World Bank



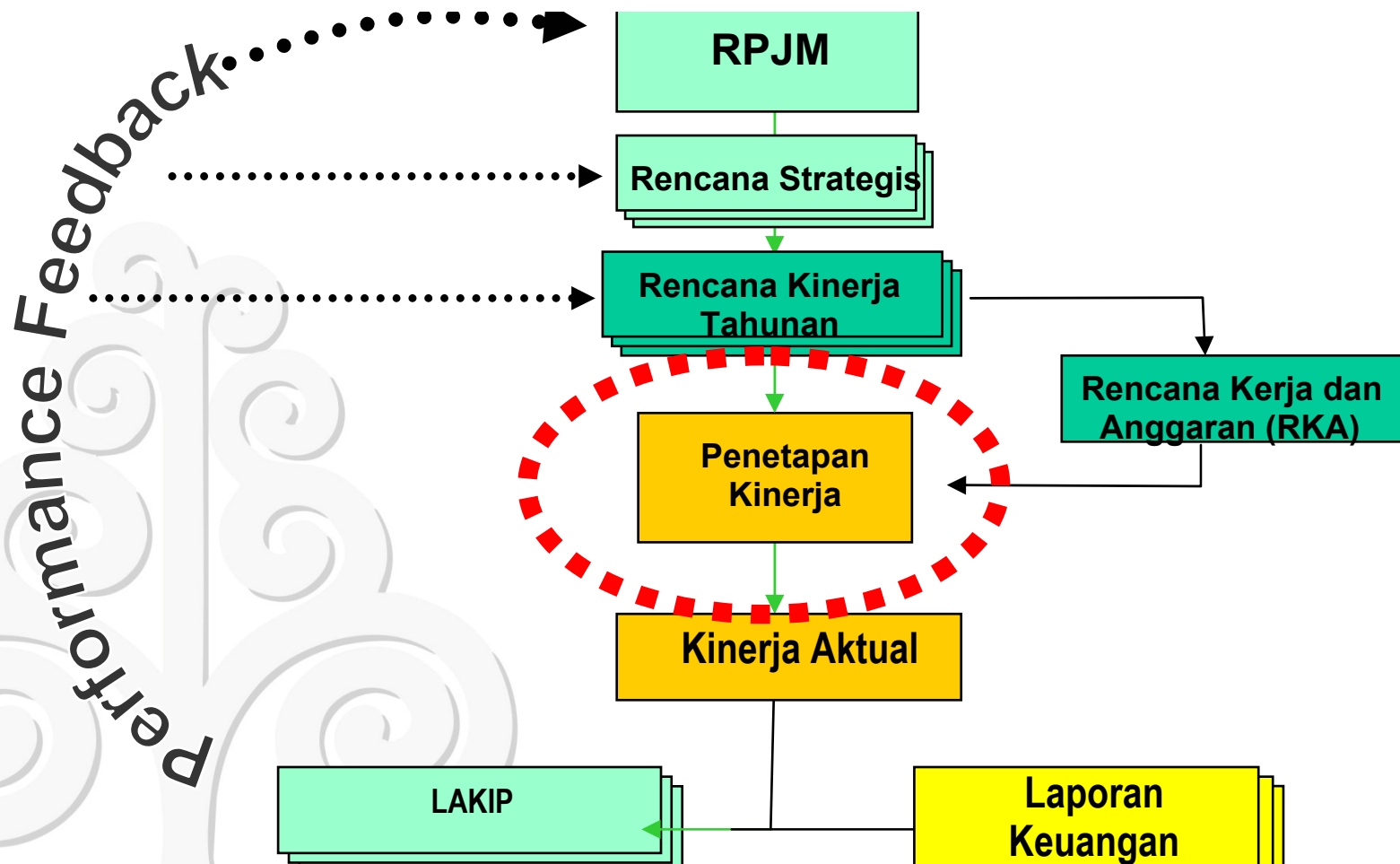
# Mengapa Banyak Rencana Tidak Terealisasi?



Sumber Data : [http://intranet.jogjakarta.go.id/monev\\_apbd](http://intranet.jogjakarta.go.id/monev_apbd)



# Keterkaitan Penetapan Kinerja dengan Sistem AKIP





# Perbedaan indikator: *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil/dampak)



## OUTPUT (KELUARAN)

1. Jumlah pasien yang dilayani
2. Panjang jalan yang diperbaiki
3. Jumlah pelatihan yang diberikan
4. Jumlah kasus kriminal yang diselidiki
5. Jumlah panggilan telpon yang dijawab.

## OUTCOME (HASIL/DAMPAK)

1. Jumlah pasien yang keadaannya membaik
2. % panjang jalan dalam keadaan baik
3. Jumlah calon tenaga kerja yang terbantu oleh pelatihan yang diberikan
4. Tingkat keberhasilan pembuktian kesalahan kasus kriminal yang berat
5. Jumlah panggilan telpon yang mendapat respon yang tepat



# Klasifikasi Umum Kegiatan Pemda

- Pelatihan.
- Diklat;
- Fasilitasi, pendampingan;
- Pemberdayaan;
- Pembinaan;
- Penyuluhan;
- Sosialisasi & diseminasi;
- Pelayanan langsung masyarakat;
- Koordinasi;
- Penyusunan dokumen;
- Pendataan. pemetaan;
- Penelitian/studi/kajian;
- Monev. inspeksi dan pelaporan;
- Pengawasan. pengendalian;
- Pemberian bantuan;
- *Event Organizer* (lomba. kontes. pameran. dll)
- Pembentukan/pendirian lembaga/badan/dll;
- Penataan lokasi. kawasan. dsb
- Pengelolaan kawasa, limbah. ekosistem. dll
- Pembangunan fisik: jalan. Jembatan, gedung. ruang. rumah, pagar, taman, irigasi. dll;
- Pengadaan barang modal lainnya;
- Pemeliharaan rutin/berkala aset daerah;
- Rehabilitasi aset daerah;
- Penyediaan barang & jasa;
- DII



UNIVERSITAS GADJAH MADA

**THANK YOU**

